KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ /K/411.013/2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah menerjemahkan secara operasional perencanaan jangka menengah daerah dan perencanaan tahunan daerah ke dalam rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, serta lokasi dan pendanaan indikatif. Selain itu, Renja Perangkat Daerah menjembati rencana strategis ke rencana operasional ke dalam langkah kebijakan tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya target kinerja rencana strategis jangka menengah.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan mengingat berdasarkan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, serta rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah berkenaan;
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan; dan/atau
c. Adanya kebijakan Nasional dan Provinsi yang mewajibkan perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah untuk diakomodir dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

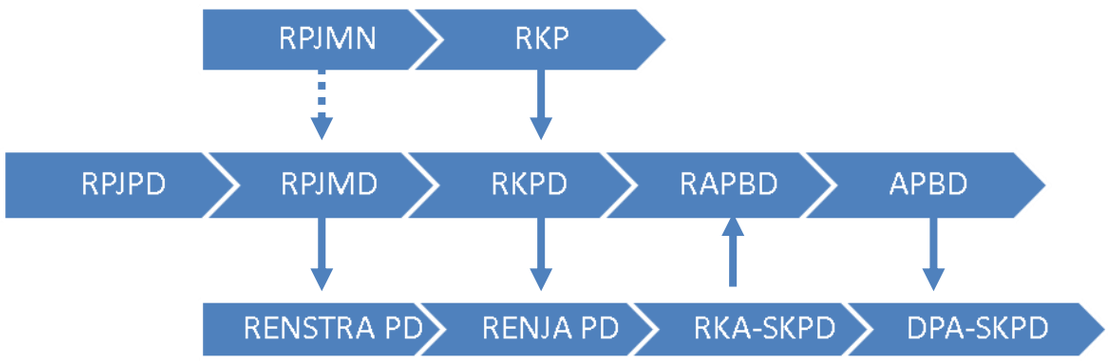
Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 mempedomai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,

dengan tahapan meliputi: (1) evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II; (2) penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; (3) penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan (4) penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.

Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:

- diperhatikan
- dipedomani dan/atau diacu
- dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra dan pada akhirnya Rencana Kerja (Renja) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Kerja Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 menjabarkan rencana Program/kegiatan dan Subkegiatan yang sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi mengacu kepada Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. **Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika**

   Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik.

2. **Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika**

   Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

   a) perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang Komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
   b) pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
   c) pelaksanaan kooordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainnya dalam rangka pelaksanaan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
   d) pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;
   e) pengelolaan dan pengembangan informasi dan komunikasi publik serta aplikasi informatika;
   f) pengelolaan dan pengembangan e-government dan smartcity;
   g) pemrosesan rekomendasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika;
   h) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
   i) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian serta bidang statistik;

j) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi :

1. Sekretariat, terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
   b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Bidang Statistik Dan Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik, terdiri dari :
   a. Seksi Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik;
   b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik;
   c. Seksi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media.
3. Bidang Aplikasi Informatika dan persandian, terdiri dari :
   a. Seksi Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), Persandian dan Keamanan informasi;
   b. Seksi Aplikasi dan database;
   c. Seksi Tata Kelola dan pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;
3. Undang–undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 80);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 182);

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika;
17. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembanginan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Kepmendagri Nomor 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;

27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 16 Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran/pagu indikatif pada Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Perubahan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

a. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program, kegiatan dan subkegiatan, indikator dan target, serta pagu indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis dari evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2023;
b. Merumuskan suatu dokumen perencanaan sebagai penjabaran Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026 pada tahun ke-1 (ke-satu) periode tahun 2024; dan
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun Berjalan dan Capaian Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk;
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2024
3.4. Rencanan Kerja dan Pendanaan
BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pelaksanaan evaluasi Perubahan Rencana Kerja sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui capain kinerja program/kegiatan/subkegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/subkegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program/kegiatan/subkegiatan Renstra ; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Dinas Kominfo

Evaluasi hasil pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Kominfo Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2024 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024, serta pencapaian Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tribulan II Tahun 2024

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (output)	Target Renstra pada Tahun 2024 s/d tahun 2026 (Periode Renstra)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra s.d. RKPD Tahun Lalu (2023)	Target Kinerja RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (2024)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja RKPD yang Dievaluasi (2024) S/D TRB II	Capaian Kinerja RKPD Th 2024 (%)	Realisasi Kinerja RPJMD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2023)	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		unit Perangkat Daerah Penanggunjawab
							I	II						
				K	K	K	K	K	K	K	K	K	Rp	
Urusan : Wajib Bukan Pelayanan dasar														
Bidang Urusan : Komunikasi dan Informatika														
1	**Terselenggaranya layanan SPBE daerah yang optimal**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota**	**Nilai Survei Kepuasan Masyarakat**	**83**		**81**	**88,61**	83	**86**	**106%**	**78**	**94%**	**31%**	
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	**91**		**81**								
		Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah yang di susun**	**90 Dokumen**	**68 Dokumen**	**69 Dokumen**	**5 Dokumen**	**1 dokumen**	**6 Dokumen**	**9%**	**73 Dokumen**	**81%**	**66%**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	33%	4 Dokumen	44%	**58%**	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	90 Dokumen	51 Dokumen	30 Dokumen	-		-	0%	51 Dokumen	**57%**	**31%**	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	90 Dokumen	32 Dokumen	30 Dokumen	-		-	0%	32 Dokumen	**36%**	**19%**	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	33%	8 Laporan	44%	**292%**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi perangkat Daerah yang di susun**	**189 Dokumen**	73 Dokumen	**63 Dokumen**	**2 Dokumen**	10 Dok	**12 Dokumen**	**19%**	**85 Dokumen**	**45%**	**38%**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	22 ASN	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	100%	22 ASN	92%	**38%**	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	135 Dokumen	-	45 Dokumen	-	9 dokumen	-	0%		0%	**5%**	
		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	100%	2 Laporan	67%	**73%**	
		Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39 Laporan	1 Laporan	13 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	46%	1 Laporan	3%	**26%**	

		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian perangkat Daerah yang di susun**	**65 Dokumen**	22 Dokumen	**25 dokumen**	**1 Dokumen**	1 Dokumen	**2 Dokumen**	**8%**	**23 Dokumen**	**35%**	**1%**	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	24 Paket	-	**-**			-	**0%**		**0%**		
		Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	22 Orang	20 Orang	20 orang	10 orang	20 orang	100%	20 orang	100%	**50%**	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan	1500 Orang	-	-			-	-		0%		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksanakan**	**36 Laporan**	12 Fasilitas	**12 laporan**	**3 Laporan**	3 Laporan	**6 Laporan**	**50%**	**17 Fasilitasi**	**47%**	**27%**	
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 Paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00%	1 Paket	100%	**50%**	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	**-**		**-**	**-**				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-	1 Paket	**-**		**-**	0%				
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	1 Paket	4 paket	1 paket	1 paket	2 paket	50%	3 paket	75%	**35%**	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	1 Paket	2 paket	1 paket	1 paket	2 paket	100%	3 paket	100%	**42%**	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2736 dokumen	890 Dokumen	1000 dokumen	76 dokumen	300 dokumen	376 dokumen	38%	1266 dokumen	46%	**30%**	
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	29 Laporan	30 laporan	7 Laporan	10 Laporan	17 Laporan	57%	46 Laporan	77%	**28%**	
		Penatausahaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	900 dokumen	1500 Dokumen	300 dokumen	-	50 dokumen	50 dokumen	17%	1550 Dokumen	100%	**20%**	
		Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah yang di adakan**	**121 buah**	2 Unit	**26 Buah**	**24 Buah**		**24 Buah**	**1**	**26 Buah**	**21%**	**10%**	
		Pengadaan Kendaraan Perseorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	-	-	-		-	-			**0%**	
		Pengadaan peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	2 Laporan	15 Unit	10 Unit	4 unit	14 Unit	93%	16 Unit	100%	**48%**	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**4 Jasa**	3 Jasa	**4 Jasa**	**1Jasa**	**1Jasa**	**2Jasa**	**50%**	**5 Jasa**	**100%**	**37%**	
		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	4 Laporan	4 laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	50%	6 Laporan	100%	**43%**	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 Laporan	12 laporan	3 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	50%	18 Laporan	100%	**37%**	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	12 Laporan	4 laporan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	50%	14 Laporan	100%	**39%**	

		Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara**	**62 Unit**	17 Unit	**42 unit**	**10 Unit**	12 Unit	**22 Unit**	**52%**	**39 Unit**	**63%**	**48%**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional lapangan.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 Unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	20 unit	100%	**53%**	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	5 Unit	5 unit	-		-	0%	5 Unit	100%	**203%**	
		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	25 unit	5 Unit	25 unit	5 Unit	10 unit	15 Unit	60%	20 Unit	80%	**43%**	
		Pemeliharaan/rehabilitasi/ gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	2 unit	1 Unit	I unit	2 Unit	100%	4 Unit	100%	**31%**	
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	**Presentase media diseminasi informasi publik yang tersedia**		**100%**				**3,59**		**104%**	**116%**	**27%**	
			Skor keterbukaan informasi publik Kabupaten Nganjuk	**90**		**60**				**0,09%**				
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/kota	**Jumlah media diseminasi informasi publik**	**-**	**7 Media Informasi**		**-**		**-**	**0%**	**7 Media Informasi**			
			Jumlah perangkat daerah berpredikat "informatif"	**10**	-	**3 PD**	**3 PD**	**3 PD**	**3 PD**	**100%**	**3**	**100%**	**27%**	
			Jumlah KIM berpredikat "aktif"	**15 KIM**	-	**5 KIM**	**5 KIM**	**5 KIM**	**5 KIM**	**100%**	**5 KIM**			
			Jumlah PD dengan media komunikasi yang aktif	**52 PD**	-	**10 PD**	**10 PD**	**10 PD**	**10 PD**	**100%**	**10 PD**			
			Persentase pengadaan masyarakat yang terespon tepat waktu	**100%**	-	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**1**			
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	5 dokumen	167%	**28%**	
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	3 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 dokumen		1 dokumen	100%	5 dokumen	167%	**45%**	
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen				0%	4 dokumen	133%	**6%**	
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	**-**	**100%**								**#DIV/0!**	
			Persentase lanyanan publik yang diselengarakan secara online dan terintegrasi	**-**	**100%**								**#DIV/0!**	
			Nilai aspek TIK	**3,50**	**-**	**2,00**						**114%**	**17%**	**0**
		Pengelolaan nama Domain yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/kota	**Nilai Tingkat kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah**	**4**	**114%**	**3**			**0,109**	**4%**	**115%**	**115%**	**19%**	**0**
		Pelaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36 Dokumen	1 Kali	12 dokumen			-	0%	1 kali	3%	**42%**	

		Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	1 sistem	1 unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	200%	**19%**	
		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten/kota	**Jumlah aplikasi pengelolaan e-government yang tersedia**	**-**	**61 Aplikasi**	**-**	**-**		**-**	**0%**	**61 Aplikasi**			
			Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE	**3**	**-**	**2**						**1**	**13%**	
			Tingkat kematangan layanan pusat data	**3**	**-**	**2**								
			Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK	**3**	**-**	**2**								
		Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit	200%	**13%**	
		Koordinasi dan sinkronisasi sistem keamanan informasi			1 Dokumen	-			-	0%	1 Dokumen	0%		
		Pengembangan Aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan berbasis elektronik.	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	12 unit	3 Aplikasi	4 Unit	1 Unit		1 Unit	25%	4 Unit	33%	**19%**	
		Pengembangan dan pengelolaan ekosistem Kabupaten/Kota cerdas dan Kota cerdas.	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	3 dokumen	2 Dokumen	1 dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	3 dokumen	100%	**28%**	
		Pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah.	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 dokumen	12 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	13 dokumen	433%	**8%**	
		Program Penyelenggaraan Statistik sektoral	**Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka**	**3**	**90%**	**2**	-	-	-	0%	**90%**	90%	**57%**	
		Penyelenggaraan Statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah buku profil daerah yang diterbitkan**	**3 Buku**	270 dataset	**1 Buku**	-		-	0%	270 dataset	100%	**57%**	
		Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisis dan Diseminasi data statistik sektoral.	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 dokumen	1 Dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 Dokumen	0%	**57%**	
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi	**Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah**	**89%**	**100%**	**87%**	**100%**	**100%**	**100%**	**115%**			**14%**	
		Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota	**Nilai tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan SPBE**	**3**	1 Buah	**2**	**1**		**1**	**50%**	**2**	**67%**	**14%**	
		Pelaksanaan Keamanan Informasi pemerintah an daerah Kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	36 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	50%	4 Laporan	11%	**14%**	

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1	≥ 91 %	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan tribulan II Tahun 2024 hasil yang dicapai sebesar 34,29% dengan kreteria Sedang. Dari Program/kegiatan dan subkegiatan Tahun 2024 sampai dengan tribulan II yang telah dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Analisi Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran sampai dengan tribulan II tahun 2024

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	106%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Dinas Kominfo berupaya memberikan pelayanan di bidang komunikasi dan informatika secara baik	Target Renstra PD sudah tercapai	Meningkatkan pelayanan melalui peningkatan fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Informasi dan Komunikasi Publik	0%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Skor keterbukaan informasi publik Kabupaten Nganjuk belum dinilai, dikarenakan masih dalam tahapan monev.	Target Renstra PD belum tercapai	Meningkatkan kegiatan informasi dan komunikasi melalui media yang populer di Kabupaten Nganjuk
Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	125%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Meningkatnya kebutuhan akan digitalisasi di semua bidang	Target Renstra PD sudah tercapai	Meningkatkan kuantitas dan kualitas aplikasi serta

pelayanan Pemerintah.		infrastruktur pendukungnya.
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	0%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Belum di laksanakan penilaian untuk Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka.	Target Renstra PD belum tercapai	Melaksanakan pengumpulan data melalui data base satu data
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	115%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Tata laksana pengamanan informasi sudah dilaksanakan namun tahun ini belum diketahui apakah terjadi hack pada aplikasi yang ada.	Target Renstra PD sudah tercapai	Meningkatkan sarana prasarana keamanan informasi.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil Analisa Kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target SPM	Target IKK	Target Renstra Dinas Kominfo					Realisasi Capaian Tahun					Proyeksi Realisasi
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nilai Indeks SPBE	-	-	Cukup (1,8-<2,6)	Cukup (1,8-<2,6)	Baik (2,6-<3,5)	Baik (2,6-<3,5)	Sangat Baik (3,5-<4,2)	Cukup (2,22)	Baik (2,62)	Cukup (2,14)	Cukup (2,18)	Sangat Baik (3,62)	103%
2	Persentase Aplikasi E-Government yang terhubung dengan jaringan	-	-	90%	90%	90%	-	-	92%	92%	94,05%	-	-	-
3	Persentase OPD yang telah menerapkan keterbukaan informasi publik	-	-	80%	85%	90%	-	-	100%	100%	71%	-	-	-
4	Persentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	98,85%	100%	100%
5	Persentase Perangkat Daerah terlayani infrastruktur jaringan yang handal dan aman	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	98%	100%	100%
6	Persentase PD berpredikat "Menuju Informatif" dalam keterbukaan informasi publik	-	-	-	-	-	13%	25%	-	-	-	7%	90%	360%
7	Persentase OPD yang melakukan update data paling sedikit 80% dari jumlah metadata secara berkala	-	-	-	-	-	60%	80%	-	-	-	100%	100%	125%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan pencapaian target pada kondisi (2023):

1. Sasaran yang realisasinya melampaui target:

- Persentase Perangkat Daerah berpredikat “ Menuju Informatif ” dalam Keterbukaan Informatif Publik (capaian 360%). Faktor yang berpengaruh:
  a. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan (Website Perangkat Daerah dan Website Desa yang digunakan untuk keterbukaan informasi publik);
  b. Tersedianya Website PPID untuk masing-masing Perangkat Daerah;
  c. Tenaga Non ASN terlatih yang bisa meliput dan menyiarkan berita Pembangunan Daerah.

- Persentase OPD yang melakukan Update Data Paling Sedikit 80% dari Jumlah Metadata secara Berkala (capaian 125%). Faktor yang berpengaruh dalam mendukung keberhasilan tercapainya kinerja ini adalah Adanya Perpres Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia.

2. Nilai Indeks SPBE (capaian 103%).
   Faktor yang berpengaruh:
   1) Kebijakan SPBE ada perbaikan, yakni:
      a) Adanya perbaikan regulasi SPBE;
      b) Perbaikan mekanisme evaluasi regulasi SPBE
   2) Tata Kelola SPBE ada perbaikan, yakni:
      a) Peningkatan tata kelola SPBE sesuai dengan manajemen ISO 27000;
   3) Manajemen SPBE ada perbaikan, yakni:
      a) Manajemen resiko, manajemen data, manajemen layanan SPBE;
      b) Audit TIK menyeluruh ke semua Perangkat Daerah;
      c) Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui Sertifikasi Keahlian;
   4) Layanan SPBE ada perbaikan, yakni:
      a) Aplikasi Aset;
      b) Aplikasi Kepegawaian;
      c) Aplikasi Pengawasan;
      d) Aplikasi Akuntabilitas;
      e) Aplikasi JDIH;
      f) Aplikasi Data Terbuka.

Untuk Kondisi tahun 2023 dari 4 indikator sasaran terdapat 4 indikator yang mencapai target yaitu :

1. Indikator Persentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi Kabupaten Nganjuk dengan target 100% realisasi sebesar 100%;
2. Indikator Persentase Perangkat Daerah terlayani infrastruktur jaringan yang handal dan aman dengan target 100% realisasinya sebesar 100%;
3. Indikator Persentase PD berpredikat "Menuju Informatif" dalam

keterbukaan Informasi Publik dengan target 25% realisasinya sebesar 90%;

4. Indikator Persentase OPD yang melakukan Update Data Paling Sedikit 80% dari Jumlah Metadata secara Berkala realisasinya 100%.

Data capaian kinerja sebagaimana tabel 2.2.1 di atas diperoleh dari sumber:

1. Data Nilai indeks SPBE merupakan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB terhadap semua instansi pusat dan Daerah;
2. Data Presentase aplikasi e-governmant yang terhubung dengan jaringan dan data Presentase layanan publik berbasis elektronik terintegrasi diperoleh dari Laporan Bidang Aplikasi, Informatika dan Persandian;
3. Persentase PD berpredikat "Menuju Informatif" dalam keterbukaan informasi publik, Persentase OPD yang melakukan update data paling sedikit 80% dari jumlah metadata secara berkala diperoleh dari Laporan Bidang Statistik Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik;

Tabel 2.2.2
Pencapaian Kinerja Utama Dinas Komuikasi dan Informatika

No.	**Indikator**	**Pehitungan**	**Kondisi kinerja pada awal periode Renstra**	**Target 2024**		**Realiasi 2024**	
			2022	**TW I**	**TW II**	**TW I**	**TW II**
1	Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang (KAMPUNG DIAL)	Hasil evaluasi KAMPUNG DIAL	N/A	7%	7%	-	7%

Dalam rangka mendorong percepatan capaian tujuan dan sasaran, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan KAMPUNG DIGITAL ANJUK LADANG (KAMPUNG DIAL) sebagai proyek Prioritas 2024-2026.

KAMPUNG DIAL adalah layanan terpadu dan berbasis elektronik di bidang pemerintahan, pelayanan publik serta pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Pembentukan KAMPUNG DIAL bertujuan untuk:

1) Pelayanan Membahagiakan, yakni menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, terpadu, berbasis elektronik sehingga membahagiakan masyarakat.

2) Keluarga Sehat, Cerdas, dan Sejahtera, yakni mewujudkan kehidupan keluarga yang sehat, cerdas, mandiri ekonomi, serta sigap melayani masyarakat rentan.
3) Masyarakat Harmonis, yakni menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, terhindar dari konflik dan gangguan kambimas, serta keluarga yang tangguh dari bencana dan tangguh dari dampak buruk teknologi dan internet, mampu lmemanfaatkan teknologi dan internet untuk kesejahteraan keluarga.
4) Pemerintah Terpercaya, yakni membangun pemerintah desa dan kelurahan yang informatif (terbuka/transparan dalam kebijakan), responsif (tanggap terhadap keluhan/pengaduan masyarakat), serta profesional (berpengetahuan, tertib, dan produktif).
5) Masyarakat Partisipatif, yakni meciptakan desa/kelurahan yang berkarakter gotong royong serta masyarakat yang aktif berpartisipasi mendukung kelancaran pembangunan desa/kelurahan.

Berdasarkan tabel 2.2.2 di atas dapat disimpulkan pencapaian target untuk Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang (KAMPUNG DIAL) sebesar 7% dari target 7% di tribulan II. Tribulan I belum ada realisasi disebabkan fokus pada penyusunan SK Penyelenggaraan KAMPUNG DIAL, SK Tim Pelaksana, SK Desa Percontohan serta fokus pada seleksi fasilitator KAMPUNG DIAL. Perhitungan untuk evaluasi KAMPUNG DIAL diperoleh dari jumlah Desa/Kelurhan yang menerapkan KAMPUNG DIAL dibagi dengan jumlah target Desa/Kelurahan.

Daftar Desa dan Kelurahan Percontohan Kampung Digital Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk sesuai Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/9/K/411.013/2024. Adapun jumlah Desa dan Kelurahan jyang ditargetkan sebanyak 20 untuk dijadikan percontohan Kampung Digital Anjuk Ladang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.1
Desa dan Kelurahan Percontohan Kampung Digital Anjuk Ladang

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN PERCONTOHAN
1	Bagor	Desa Sekarputih
2	Baron	Desa Kemaduh
3	Berbek	Desa Sendangbumen
4	Gondang	Desa Mojoseto
5	Jatikalen	Desa Munung
6	Kertosono	Desa Bangsri
7	Lengkong	Desa Lengkong

8	Loceret	Desa Tempelwetan
9	Nganjuk	Kelurahan Mangundikaran
10	Ngetos	Desa Kuncir
11	Ngluyu	Desa Sugihwaras
12	Ngronggot	Desa Kalianyar
13	Pace	Desa Mlandangan
14	Patianrowo	Desa Lestari
15	Prambon	Desa Nglawak
16	Rejoso	Desa Talang
17	Sawahan	Desa Sidorejo
18	Sukomoro	Desa Nglundo
19	Tanjunganom	Desa Malangsari
20	Wilangan	Desa Ngadipiro

Tabel 2.2.3
Pencapaian Kinerja Kunci Dinas Komuikasi dan Informatika

No.	**Indikator Kinerja Kunci**	**Formulasi Pehitungan**	**Kondisi kinerja pada awal periode Renstra**	**Target**	**Realiasi**
			2022	**2024**	**2024**
1	Nilai aspek TIK	Hasil Penilaian Indeks SPBE	1,75	2,00	-
2	Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka	Hasi Penilaian Indeks SPBE	1	2	-
3	Skor keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk	Hasil SAQ evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	*51,18	60	-

- Nilai Indeks SPBE merupakan hasil evaluasi Kemenpan RB secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018. Terdapat 4 (empat) domain yang dinilai tingkat kematangannya (maturity level) yaitu domain Kebijakan Internal SPBE, domain Tata Kelola SPBE, Domain Manajemen SPBE dan domain Layanan SPBE. Dari 4 domain yang dinilai, dijabarkan lagi menjadi 47 indikator dan penilaian dilakukan 1 kali dalam satu tahun.
- Keterbukaan Informasi Publik ditetapkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Skor KIP dikategorikan menjadi 5 (lima) kategori yaitu tidak informatif, kurang informatif, cukup informatif, menuju informatif dan informatif. Penilaian KIP dilakukan melalui Self Assesment Question atau SAQ oleh masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Nganjuk dengan skor atau nilai sampai dengan 100.

Berdasarkan tabel 2.2.3 di atas dapat disimpulkan pencapaian target Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika belum ada realisasi untuk penilaian Indek SPBE dikarenakan penilaian dilakukan satu tahun sekali oleh Kemenpan RB sedangkan untuk skor KIP belum ada realisasi dikarenakan masih dalam tahap Monev.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo

Permasalahan bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian sebagaimana tabel 2.3.1 di bawah ini :

Tabel 2.3.1
Permasalahan bidang Komunikasi dan Informasi, Statistik dan Persandian

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Lambatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik Data dukung: b. Capaian Indeks SPBE - **2023 3,62** - **2022 2,18** - **2021 2,14** - **2020 2,62** - **2019 2,22** c. Capaian Indeks KAMI - **2021 415** - **2022 446** - **2023 464**	1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur TIK Data dukung: - Persentase OPD terlayani jaringan fiber optik internet dedicated pada **2023: 100%** - Masih adanya daerah blank spot di Kabupaten Nganjuk 2. Terbatasnya jumlah dan mutu SDM TIK Data dukung: - Jumlah ASN Nganjuk kualifikasi TIK **2023 : 43 orang** 3. Dukungan kebijakan belum optimal - Perda SPBE: belum tersedia - Perda Keterbukaan Informasi Publik: **belum tersedia**	1. Penyediaan jaringan internet belum terintegrasi di Diskominfo Data dukung: - Anggaran internet pada 52 OPD R-APBD **2023: Rp. 5,3 Milyar** 2. Minimnya peluang pendidikan pelatihan TIK bagi ASN Data dukung: - Anggaran diklat TIK APBD **2023: belum tersedia** 3. Belum optimalnya pengelolaan data daerah Data dukung: - Tingkat kematangan kebijakan manajemen data 2023: **4 (dari optimal 5)** - Tingkat kematangan penerapan manajemen data 2023: **4 (dari optimal 5)** - Tingkat kematangan layanan data terbuka 2023**: 2 (dari optimal 5)** 4. Masyarakat belum dapat mengakses informasi publik secara optimal Data dukung: - Predikat Keterbukaan Informasi Publik Kab. Nganjuk **2023: Informatif** 5. Penerapan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya optimal Data dukung: - Skor RB **2022: 72,04**

Identifikasi Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Tingginya kebutuhan implementasi transformasi digital.
2. Tuntutan publik akan keterbukaan informasi.
3. Kebutuhan yang tinggi atas data yang valid dan terbarui.
4. Menguatnya kesadaran dan kebutuhan masyarakat terhadap

keamanan informasi.

A. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu :

Tantangan :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik;
2. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Pesatnya perkembangan TIK;
4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata;
5. Terbatasnya kualitas SDM dan pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK.
6. Pandemi covid 19 yang menyebabkan perubahan tatanan kehidupan masyarakat dan menurunnya perekonomian.

Peluang :

1. Tersedianya peraturan perundangan-undangan yang mendasari regulasi bidang komunikasi dan informatika;
2. Kepedulian dan dukungan pimpinan terhadap bidang komonikasi dan informatika;
3. Dukungan pemerintah dan KPK untuk mendorong implementasi e-government untuk mewujudkan good governance;
4. Adanya perjanjian kerja sama antar daerah untuk implementasi dan pengembangan e-government;
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya teknologi dan informasi;
6. Adanya bantuan dari Kemenkominfo untuk menyusun roadmap smartcity Kabupaten Nganjuk.

B. Formulasi isi-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika;
2. Optimalisasi Pelaksanaan e-Govermant di Kabupaten Nganjuk;
3. Pemberdayaan masyarakat melalui TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) melalui : pengelolaan media center dan diadakannya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan wahana pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat sebagai agen penyebarluasan informasi sekaligus sebagai *publik relation* diwilayahnya;
4. Pengelolaan website Pemkab Nganjuk;

5. Pengelolaan keterbukaan informasi melalui PPID;
6. Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media online, media cetak dan media luar ruang;
7. Melaksanakan layanan pengaduan publik melalui Wadul Bupati dan Lapor SP4N;
8. Penyusunan Data Statistik Sektoral yang lebih akurat dan tepat waktu;
9. Pengamanan informasi pemerintah daerah yang lebih baik.

Tabel. 2.4.1
Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2024
Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**25.269.573.507,00**	**23.635.205.045,00**	**23.930.065.845,00**	**-1.339.507.662,00**							**27.158.813.942,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**25.269.573.507,00**	**23.635.205.045,00**	**23.930.065.845,00**	**-1.339.507.662,00**							**27.158.813.942,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**23.728.693.757,00**	**22.518.106.045,00**	**22.586.966.845,00**	**-1.141.726.912,00**							**26.208.813.942,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**				**81 Nilai**	**81 Nilai**	**5.744.826.895,00**	**6.260.612.504,00**	**6.019.251.104,00**	**266.987.047,00**							**6.011.813.942,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*				69 Dokumen	69 Dokumen	48.240.000,00	60.745.500,00	80.745.500,00	32.505.500,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Pegawai Dinas Kominfo		34.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	6.000.000,00	18.440.000,00	18.440.000,00	12.440.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	10.000.000,00	12.305.000,00	12.305.000,00	2.305.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				30 Dokumen	30 Dokumen	10.000.000,00	7.153.000,00	7.153.000,00	-2.847.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			10.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	6 Laporan	22.240.000,00	22.847.500,00	42.847.500,00	20.607.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			4.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang di susun*				63 Dokumen	63 Dokumen	3.523.000.000,00	4.346.816.000,00	3.956.702.000,00	433.702.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Pegawai Dinas Kominfo		3.523.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	22 Orang/bulan	3.500.000.000,00	4.327.683.000,00	3.937.569.000,00	437.569.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			3.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				45 Dokumen	45 Dokumen	15.000.000,00	11.715.000,00	11.715.000,00	-3.285.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	-600.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			5.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	3.000.000,00	3.018.000,00	3.018.000,00	18.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			3.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun*				25 Dokumen	25 Dokumen	13.550.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	-5.550.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Pegawai Dinas Kominfo		59.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				24 Paket	24 Paket	5.550.000,00	0,00	0,00	-5.550.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	20 Orang	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			9.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-	100 Orang	0,00	0,00	0,00	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksanakan*				12 Laporan	12 Laporan	388.952.550,00	498.998.800,00	523.998.300,00	135.045.750,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Pegawai Dinas Kominfo		378.813.942,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6.000.000,00	12.067.050,00	12.067.050,00	6.067.050,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			6.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2.000.000,00	22.018.900,00	22.018.900,00	20.018.900,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	90.000.000,00	127.816.800,00	152.816.300,00	62.816.300,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			91.413.942,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	16.000.000,00	13.857.500,00	13.857.500,00	-2.142.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			16.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1000 Dokumen	1000 Dokumen	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			8.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	260.860.000,00	309.146.000,00	309.146.000,00	48.286.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				300 Dokumen	300 Dokumen	7.092.550,00	7.092.550,00	7.092.550,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			7.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				300 Dokumen	300 Dokumen	7.092.550,00	7.092.550,00	7.092.550,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			7.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan*				26 Buah	26 Buah	936.670.215,00	311.717.304,00	320.887.304,00	-615.782.911,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Pegawai Dinas Kominfo		1.195.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	784.001.325,00	0,00	0,00	-784.001.325,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			1.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	15 Unit	152.668.890,00	311.717.304,00	320.887.304,00	168.218.414,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			195.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia*				4 Jasa	4 Jasa	476.575.000,00	461.875.000,00	461.875.000,00	-14.700.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Pegawai Dinas Kominfo		526.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			1.500.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	356.800.000,00	356.800.000,00	-43.200.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			450.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	75.075.000,00	103.575.000,00	103.575.000,00	28.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			75.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara*				42 Unit	42 Unit	357.839.130,00	572.459.900,00	667.043.000,00	309.203.870,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Pegawai Dinas Kominfo		295.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	174.999.000,00	230.916.100,00	310.919.200,00	135.920.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			180.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel																	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	5 Unit	10.000.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	2.800.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	13.070.000,00	28.520.000,00	43.100.000,00	30.030.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			15.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	159.770.130,00	300.223.800,00	300.223.800,00	140.453.670,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Skor keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk**				**60 Nilai**	**60 Nilai**	**2.179.999.400,00**	**1.970.811.000,00**	**2.249.810.800,00**	**117.000.600,00**							**2.297.000.000,00**	
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah KIM berpredikat "Aktif"* *Jumlah PD dengan Media Komunikasi yang aktif* *Jumlah Perangkat Daerah berpredikat "Informatif"* *Persentase pengaduan masyarakat yang terespon tepat waktu*				100 % 10 PD 3 PD 5 KIM	100 % 10 PD 3 PD 5 KIM	2.179.999.400,00	1.970.811.000,00	2.249.810.800,00	69.811.400,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Masyarakat		2.297.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.999.400,00	1.775.806.000,00	2.054.805.900,00	54.806.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			2.100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	99.910.000,00	99.910.000,00	19.910.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			82.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan																		
			Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	95.095.000,00	95.094.900,00	-4.905.100,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			115.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Nilai Aspek TIK**				**2,00 Nilai**	**2,00 Nilai**	**15.803.867.462,00**	**14.286.682.541,00**	**14.317.904.941,00**	**2.096.132.538,00**							**17.900.000.000,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat Kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah*				3 Nilai	3 Nilai	6.248.849.000,00	8.050.139.834,00	8.135.264.834,00	1.886.415.834,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk		10.050.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	79.224.000,00	67.845.000,00	67.845.000,00	-11.379.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			50.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																	
			Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				1 Unit	1 Unit	6.169.625.000,00	7.982.294.834,00	8.067.419.834,00	1.897.794.834,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	- -			10.000.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat kematangan layanan pusat data Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK*				2 Nilai	2 Nilai	9.555.018.462,00	6.236.542.707,00	6.182.640.107,00	-3.372.378.355,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk		7.850.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah																	
			Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	1.906.477.662,00	1.312.183.250,00	1.412.183.250,00	-494.294.412,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			1.250.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik																	
			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				4 Unit	4 Unit	501.950.000,00	403.420.000,00	403.420.000,00	-98.530.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1 Dokumen	4.848.130.800,00	2.924.513.457,00	2.818.610.857,00	-2.029.519.943,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			1.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	2.298.460.000,00	1.596.426.000,00	1.548.426.000,00	-750.034.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			4.500.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**800.000.000,00**	**502.403.000,00**	**502.403.000,00**	**-297.597.000,00**							**600.000.000,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka**				**2 Nilai**	**2 Nilai**	**800.000.000,00**	**502.403.000,00**	**502.403.000,00**	**-200.000.000,00**							**600.000.000,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah buku profil daerah yang diterbitkan*				1 Buku	1 Buku	800.000.000,00	502.403.000,00	502.403.000,00	-297.597.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk		600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	502.403.000,00	502.403.000,00	-297.597.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			600.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**740.879.750,00**	**614.696.000,00**	**840.696.000,00**	**99.816.250,00**							**350.000.000,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah**				**87 %**	**87 %**	**740.879.750,00**	**614.696.000,00**	**840.696.000,00**	**-390.879.750,00**							**350.000.000,00**	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanaan SPBE*				2 Nilai	2 Nilai	740.879.750,00	614.696.000,00	840.696.000,00	99.816.250,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk		350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				12 Laporan	12 Laporan	740.879.750,00	614.696.000,00	840.696.000,00	99.816.250,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov) Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)			350.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	JUMLAH								**25.269.573.507,00**	**23.635.205.045,00**	**23.930.065.845,00**	**-1.339.507.662,00**							**27.158.813.942,00**	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5.1
Usulan program dan kegiatan dari masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2023 mengangkat tema "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

Berdasar telaahan rancangan RKP 2023, Diskominfo Kabupaten Nganjuk mengimplementasikan Prioritas Nasional ke 5 yaitu Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar dan Prioritas Nasional ke 7 yaitu Memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 Tujuan yang ingin dicapai adalah : **Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik**.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk tahun 2024-2026 adalah: **Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara Optimal.**

Untuk tahun 2024 tujuan dan sasaran serta target yang hendak dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indiktor Tujuan/Sasaran	Target 2024
1	2	3	
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pemerintahan daerah dan pelayanan publik		Nilai Indeks SPBE	2,50
	Terwujudnya kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE yang optimal	Persentase penerapan Kampung Digital Anjuk Ladang	7%

3.3 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2024

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tahun 2024 serta melaksanakan Visi dan Misi Bupati maka Dinas Komunikasi dan informatika menyusun Rencana Kerja yang terdiri dari 5 Program, 12 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan. Lokasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan sebagian besar di Dinas Komunikasi dan informatika serta desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Nganjuk.

Adapun yang melatarbelakangi perubahan atas program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3.1

Kode	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Sebelum	Sesudah	Perubahan (Bertambah/ Berkurang)	Keterangan
2.16.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH**	**6.310.612.504**	**6.019.251.104**	**-291.361.400**	
2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60.745.500**	**80.745.500**	**20.000.000**	
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.440.000	18.440.000	-	
2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.305.000	12.305.000	-	
2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.153.000	7.153.000	-	
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.847.500	42.847.500	20.000.000	Banyak kegiatan yang dilakukan di luar jam kantor dengan anggaran yang kurang mencukupi
2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.346.816.000**	**3.956.702.000**	**-390.114.000**	
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.327.683.000	3.937.569.000	-390.114.000	Anggaran gaji dan tunjangan untuk ASN melebihi kebutuhan oyang telah ditentukan sebelumnya

2.16.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan PengujianVerifikasi Keuangan SKPD	11.715.000	11.715.000	-	
2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.400.000	4.400.000	-	
2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.018.000	3.018.000	-	
2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**58.000.000**	**8.000.000**	**-50.000.000**	
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	
2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.000.000	8.000.000	-	
2.16.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	50.000.000		-50.000.000	Sesuai dengan kesepakatan dengan pihak terkait anggaran DBHCHT induk yang didapat dijadikan satu dengan anggaran DBHCHT Silpa yang terletak pada Pengelolaan Medi Komunikasi Publik
2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**498.998.800**	**523.998.300**	**24.999.500**	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.067.050	12.067.050	-	
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		-	-	
2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.018.900	22.018.900	-	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	127.816.800	152.816.300	24.999.500	Banyak kegiatan didalam dan diluar kantor yang membutuhkan natura atau air minum
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.857.500	13.857.500	-	
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.000.000	7.000.000	-	
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	309.146.000	309.146.000	-	
2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7.092.550	7.092.550	-	
2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**	**311.717.304**	**320.887.304**	**9.170.000**	
2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	

2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	311.717.304	320.887.304	9.170.000	Terdapat penambahan belanja modal Alat Rumah Tangga Lainnya untuk keperluan kantor (2 Tangga Teleskopik Uk 75 m) dan Belanja Modal Peralatan Mainframe (Harddisk Internal-SSD)
2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**461.875.000**	**461.875.000**	**-**	
2.16.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000	-	
2.16.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.800.000	356.800.000	-	
2.16.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	103.575.000	103.575.000	-	
2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**572.459.900**	**667.043.000**	**94.583.100**	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.916.100	310.919.200	80.003.100	Banyak kegiatan kantor didalam maupun diluar daerah yang membutuhkan kendaraan operasional sehingga dibutuhkan pemeliharaan ekstra untuk merawat kendaraan dinas operasional
2.16.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	12.800.000	12.800.000	-	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.520.000	43.100.000	14.580.000	seringnya penggunaan peralatan kantor sehingga butuh perawatan yang memadai
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.223.800	300.223.800	-	
2.16.02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**1.970.811.000**	**2.249.810.800**	**278.999.800**	
2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah**	**1.970.811.000**	**2.249.810.800**	**278.999.800**	
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.775.806.000	2.054.805.900	278.999.900	Adanya pelaksanaan kegiatan Awording sehingga membutuhkan suntikan dana lebih untuk memperlancar kegiatan tersebut
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	99.910.000	99.910.000	-	
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	95.095.000	95.094.900	-100	
2.16.03	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**14.286.682.541**	**14.317.904.941**	**31.222.400**	
2.16.03.2.01	**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**8.050.139.834**	**8.135.264.834**	**85.125.000**	

2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	67.845.000	67.845.000	-	
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	7.982.294.834	8.067.419.834	85.125.000	Kurangnya Belanja Internet untuk Wifi Gratis serta Pemasangan Desa yang Blank Spot
2.16.03.2.02	**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**6.236.542.707**	**6.182.640.107**	**-53.902.600**	
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.312.183.250	1.412.183.250	100.000.000	Pemutakhiran GPU server dan pembayaran colocation
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elekronik	403.420.000	403.420.000	-	
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	2.924.513.457	2.818.610.857	- 105.902.600	Geser untuk Pemutakhiran GPU server dan pembayaran colocation serta Belanja Internet
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1.596.426.000	1.548.426.000	- 48.000.000	Geser untuk belanja internet
2.20.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**502.403.000**	**502.403.000**	**-**	
2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah**	**502.403.000**	**502.403.000**	**-**	
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	502.403.000	502.403.000	-	
2.21.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN**	**614.696.000**	**840.696.000**	**226.000.000**	
2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah**	**614.696.000**	**840.696.000**	**226.000.000**	
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	614.696.000	840.696.000	226.000.000	Kebutuhan atas Firewall Pengamanan Server, Pembelian Lisensi Aplikasi untuk Keamanan Pusat Data
	Total	23.685.205.045	23.930.065.845	244.860.800	

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
5) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
6) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
7) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
8) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
10) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
11) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
12) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor;
13) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
14) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
15) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
16) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
17) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;
18) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
19) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
20) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
21) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
22) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
23) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
24) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

25) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan;
26) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel;
27) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
28) Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;

2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
29) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah;
30) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
31) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
32) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas;

b. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah.
33) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota;
34) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah;

3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
35) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
36) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4. Program Informasi Dan Komunikasi Publik

a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
37) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
38) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
39) Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan.

5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.

40) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

Untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan/sub kegiatan di tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk membutuhkan Anggaran sebesar Rp. 23.930.065.845,00 yang dipenuhi dari sumber Dana Alokasi Umum.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk adalah:

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo :
   1. Terwujudnya kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE yang optimal;
   2. Terwujudnya keterbukaan informasi publik di Kabupaten Nganjuk;
   3. Terwujudnya data sektoral yang valid dan termutakhirkan;
   4. Meningkatnya keamanan informasi pemerintah daerah;
   5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi pemerintahan.

2. Mendukung Pencapaian Target Indikator Sustainable Development Goals (SDGs)

   Selain mendukung visi dan misi Kepala Daerah, kegiatan tahun 2024 juga mendukung pencapaian target SDGs yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Komunikasi dan informatika. Target SDGs yang dimaksud adalah :

   a. Jumlah Perangkat daerah yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No.14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan target 50 Instansi.
   b. Presentase penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi dengan target 100%.
   c. Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan target 52 PPID.
3. Mempercepat pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Intruksi Presiden Nomor 95 tahun 2018.
4. Melaksanakan Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
5. Melaksanakan Perka BPS Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggarakan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah.
6. Melaksanakan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

Rumusan Rencana program/kegiatan/ sub kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 sebagaimana ***Tabel Berikut:***

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika 2024 dan perkiraan maju tahun 2025

Anggaran Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Kebutuhan Tahun 2025					Catatan Penting
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai Survei Kepuasan masyarakat**	**Diskominfo**	**81**	**6.019.251.104**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai AKIP Perangkat Daerah**	**Diskominfo**	**86**	**6.567.313.942**	
	Nilai AKIP Perangkat Daerah	**Diskominfo**	**81**			**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**	**Diskominfo**	**82**		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Diskominfo**	**69 Dok**	**80.745.500**	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Diskominfo**	**69 Dok**	**55.000.000**	
a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	3 Dok	18.440.000	a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	4 Dokumen	20.000.000	
b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskominfo	30 Dok	12.305.000	b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskominfo	30 Dokumen	15.000.000	
c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Diskominfo	30 Dok	7.153.000	c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Diskominfo	30 Dokumen	10.000.000	
d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo	6 Laporan	42.847.500	d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo	6 Laporan	10.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi keuangan perangkat daerah yang di susun**	**Diskominfo**	**63 Dok**	**3.956.702.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi keuangan perangkat daerah yang di susun**	**Diskominfo**	**63 Dokumen**	**3.540.000.000**	
a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	22 ASN	3.937.569.000	a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	22 Orang/bulan	3.500.000.000	
b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Diskominfo	45 Dok	11.715.000	b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Diskominfo	45 Dokumen	20.000.000	
c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo	1 Lap	4.400.000	c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo	1 Laporan	10.000.000	
d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskominfo	13 Lap	3.018.000	d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskominfo	13 Laporan	10.000.000	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun**	**Diskominfo**	**25 Dok**	**8.000.000**	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun**	**Diskominfo**	**25 Dokumen**	**509.000.000**	
a) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diskominfo	20 Orang	8.000.000	a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Diskominfo	0	0	
b) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Diskominfo	24 paket	0	b) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diskominfo	20 Orang	9.000.000	
c) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskominfo	500 Orang	0	c) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskominfo	2500 Orang	500.000.000	

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksanakan**	**Diskominfo**	**12 laporan**	**523.998.300**	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksanakan**	**Diskominfo**	**12 laporan**	**432.813.942**	
a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskominfo	1 Paket	12.067.050	a) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskominfo	1 Paket	10.000.000	
b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskominfo	1 Paket	0	b) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskominfo	1 Paket	50.000.000	
c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Diskominfo	1 Paket	22.018.900	c) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Diskominfo	0 Paket	0	
d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskominfo	4 Paket	152.816.300	d) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskominfo	4 Paket	91.413.942	
e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Diskominfo	2 paket	13.857.500	e) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Diskominfo	2 paket	16.200.000	
f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskominfo	912 dok	7.000.000	f) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskominfo	912 Dokumen	8.000.000	
g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	30 Lap	309.146.000	g) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	30 Laporan	250.000.000	
h) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskominfo	300 dok	7.092.550	h) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskominfo	300 Dokumen	7.200.000	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**Diskominfo**	**26 buah**	**320.887.304**	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**Diskominfo**	**26 buah**	**1.195.000.000**	
a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang Disediakan	Diskominfo	2 unit	-	a) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang Disediakan	Diskominfo	2 unit	1.000.000.000	
b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Diskominfo	15 unit	320.887.304	b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Diskominfo	15 unit	195.000.000	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**Diskominfo**	**4 jasa**	**461.875.000**	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**Diskominfo**	**4 jasa**	**532.000.000**	
a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	4 Laporan	1.500.000	a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	4 Laporan	2.000.000	
b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskominfo	12 Laporan	356.800.000	b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskominfo	12 Laporan	450.000.000	
c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskominfo	12 laporan	103.575.000	c) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskominfo	12 laporan	80.000.000	

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara**	**Diskominfo**	**42 unit**	**667.043.000**	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara**	**Diskominfo**	**42 unit**	**303.500.000**	
a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Diskominfo	10 unit	310.919.200	a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Diskominfo	10 unit	180.000.000	
b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Diskominfo	5 unit	12.800.000	b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Diskominfo	0 Unit	0	
c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Diskominfo	25 unit	43.100.000	c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Diskominfo	25 unit	23.500.000	
d) Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskominfo	2 Unit	300.223.800	d) Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskominfo	2 Unit	100.000.000	
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	**Nilai aspek TIK**		**2,00**	**14.317.904.941**	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**Nilai Aspek TIK**	**Diskominfo**	**2,50 Nilai**	**17.950.000.000**	
Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten	**Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE**	**Diskominfo**	**2**	**6.182.640.107**	**Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten**	**Tingkat Kematangan pembangunan aplikasi SPBE**	**Diskominfo**	**3**	**17.900.000.000**	
	Tingkat kematangan layanan pusat data		**2**			**Tingkat kematangan Layanan Pusat Data**		**3**		
	Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK		**2**			**Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK**		**3**		
a) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Diskominfo	1 Pusat Data	1.412.183.250	a) Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah	Diskominfo	1 Dokumen	1.250.000.000	
b) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Diskominfo	4 Aplikasi	403.420.000	b) Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi Khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Diskominfo	2 Aplikasi	600.000.000	
c) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo	1 Dok	1.548.426.000	c) Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	Diskominfo	1 Unit	6.050.000.000	
d) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Diskominfo	1 Dok	2.818.610.857	d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Diskominfo	52 Perangkat Daerah	10.000.000.000	
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah	**Nilai Tingkat kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah**	**Diskominfo**	**3**	**8.135.264.834**	**Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah**	**Nilai tingkat kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah Tingkat Kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah**	**Diskominfo**	**3 Nilai**	**50.000.000**	
a) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	12 Dokumen	67.845.000	a) Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Diskominfo	12 Dokumen	50.000.000	
b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	1 unit	8.067.419.834						

Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	**Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah**	**Diskominfo**	**87%**	**840.696.000**	**Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**Nilai Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka**	**Diskominfo**	**3 Nilai**	**350.000.000**	
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Nilai Tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan SPBE**	**Diskominfo**	**2**	**840.696.000**	**Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan kegiatan self Asesment website dan aplikasi**	**Diskominfo**	**2 Lap**	**350.000.000**	
a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo	20 Laporan	840.696.000	a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo	12 Laporan	250.000.000	
b) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Diskominfo	52 PD	0	b) Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Diskominfo	52 Perangkat Daerah	100.000.000	
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	**Skor keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk**	**Diskominfo**	**6000%**	**2.249.810.800**	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**Persentase PD berpredikat "Menuju Informatif" dalam keterbukaan Informasi Publik**	**Diskominfo**	**80 Nilai**	2.297.000.000	
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota	**Jumlah perangkat daerah berpredikat "Informatif"**	**Diskominfo**	**300%**	**2.249.810.800**	**Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota**	**Jumlah KIM berpredikat "Aktif"**		**10 KIM**	**2.297.000.000**	
	- Jumlah KIM berpredikat "Aktif"		**5 KIM**			**Jumlah PD dengan media komunikasi yang aktif**		**25 PD**		
	- Jumlah PD dengan media komunikasi yang aktif		**10 PD**			**Jumlah Perangkat Daerah Berpredikat " Informatif "**	**Diskominfo**	**5 PD**		
	- Persentase pengaduan masyarakat yang terespon tepat waktu		**100%**			**Persentase pengaduan masyarakat yang terespon tepat waktu**		**100%**		
a) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	1 Dok	2.054.805.900	a) Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunikasi Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Diskominfo	10 Komunitas	115.000.000	
b) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo	1 Dok	99.910.000	b) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo	30 Permohonan	82.000.000	
c) Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Diskominfo	1 Dok	95.094.900	c) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	7 Media	2.100.000.000	
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral statistik sektoral	**Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka**	**Diskominfo**	**2**	**502.403.000**	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral statistik sektoral**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah**	**Diskominfo**	**3**	**1.000.000.000**	
Kegiatan Penyelengaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten atau Kota	**Jumlah buku profil daerah yang diterbitkan**	**Diskominfo**	**1 Buku**	**502.403.000**	**Kegiatan Penyelengaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten atau Kota**	**Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan**	**Diskominfo**	**1 Buku**	1.000.000.000	
a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo	1 dok	502.403.000	a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah Kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi metadata	Diskominfo	1 dok	1.000.000.000	
TOTAL				**23.930.065.845**					**28.164.313.942**	

3.4 Rencana Kerja Dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2024 berisi program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.

Tabel 3.4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2024)
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).	23.930.065.845

Tabel 3.4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran Dinas Kominfo	Alokasi (2024)
1	Terselenggaranya Layanan SPBE Daerah secara Optimal	23.930.065.845

Tabel 3.4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024

Indikator Kinerja Tahun 2024					
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		**Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
1		**2**	**3**	**4**	**5**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		**Nilai Survei Kepuasan masyarakat**	**Diskominfo**	**81**	**6.019.251.104**
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	**Diskominfo**	**81**	
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Diskominfo**	**69 Dok**	**80.745.500**
a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskominfo	3 Dok	18.440.000
b)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Diskominfo	30 Dok	12.305.000
c)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Diskominfo	30 Dok	7.153.000

Indikator Kinerja Tahun 2024					
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		**Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
1		**2**	**3**	**4**	**5**
d)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskominfo	6 Laporan	42.847.500
Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Jumlah Dokumen Administrasi keuangan perangkat daerah yang di susun**	**Diskominfo**	**63 Dok**	**3.956.702.000**
a)	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Diskominfo	22 ASN	3.937.569.000
b)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Diskominfo	45 Dok	11.715.000
c)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskominfo	1 Lap	4.400.000
d)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskominfo	13 Lap	3.018.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang disusun**	**Diskominfo**	**25 Dok**	**8.000.000**
a)	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Diskominfo	20 Orang	8.000.000
b)	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Diskominfo	24 paket	0
c)	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Diskominfo	500 Orang	0
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Jumlah Laporan administrasi umum yang dilaksanakan**	**Diskominfo**	**12 laporan**	**523.998.300**
a)	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Diskominfo	1 Paket	12.067.050
b)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Diskominfo	1 Paket	0
c)	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Diskominfo	1 Paket	22.018.900
d)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Diskominfo	4 Paket	152.816.300
e)	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Diskominfo	2 paket	13.857.500
f)	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Diskominfo	912 dok	7.000.000
g)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskominfo	30 Lap	309.146.000

Indikator Kinerja Tahun 2024					
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		**Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
1		**2**	**3**	**4**	**5**
h)	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskominfo	300 dok	7.092.550
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**Diskominfo**	**26 buah**	**320.887.304**
a)	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang Disediakan	Diskominfo	2 unit	-
b)	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Diskominfo	15 unit	320.887.304
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia**	**Diskominfo**	**4 jasa**	**461.875.000**
a)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskominfo	4 Laporan	1.500.000
b)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Diskominfo	12 Laporan	356.800.000
c)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Diskominfo	12 laporan	103.575.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara**	**Diskominfo**	**42 unit**	**667.043.000**
a)	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Diskominfo	10 unit	310.919.200
b)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Diskominfo	5 unit	12.800.000
c)	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	Diskominfo	25 unit	43.100.000
d)	Sub Kegiatan Pemeliharaan atau Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Diskominfo	2 Unit	300.223.800
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		**Nilai aspek TIK**		**2,00**	**14.317.904.941**
Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten		**Tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE**	**Diskominfo**	**2**	**6.182.640.107**
		Tingkat kematangan layanan pusat data		**2**	
		Tingkat kematangan penerapan manajemen aset TIK		**2**	
a)	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Diskominfo	1 Pusat Data	1.412.183.250
b)	Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Diskominfo	4 Aplikasi	403.420.000
c)	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Diskominfo	1 Dok	1.548.426.000
d)	Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Diskominfo	1 Dok	2.818.610.857

Indikator Kinerja Tahun 2024					
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		**Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
1		**2**	**3**	**4**	**5**
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah		**Nilai Tingkat kematangan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah**	**Diskominfo**	**3**	**8.135.264.834**
a)	Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo	12 Dokumen	67.845.000
b)	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Diskominfo	1 unit	8.067.419.834
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		**Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang ada pada pemerintah daerah**	**Diskominfo**	**87%**	**840.696.000**
Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		**Nilai Tingkat kematangan pelaksanaan audit keamanan SPBE**	**Diskominfo**	**2**	**840.696.000**
a)	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskominfo	20 Laporan	840.696.000
b)	Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Diskominfo	52 PD	0
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		**Skor keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Nganjuk**	**Diskominfo**	**6000%**	**2.249.810.800**
Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota		**Jumlah perangkat daerah berpredikat "Informatif"**	**Diskominfo**	**300%**	**2.249.810.800**
		- Jumlah KIM berpredikat "Aktif"		**5 KIM**	
		- Jumlah PD dengan media komunikasi yang aktif		**10 PD**	
		- Persentase pengaduan masyarakat yang terespon tepat waktu		**100%**	
a)	Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Diskominfo	1 Dok	2.054.805.900
b)	Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Diskominfo	1 Dok	99.910.000
c)	Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Diskominfo	1 Dok	95.094.900
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral statistik sektoral		**Nilai tingkat kematangan layanan data terbuka**	**Diskominfo**	**2**	**502.403.000**
Kegiatan Penyelengaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten atau Kota		**Jumlah buku profil daerah yang diterbitkan**	**Diskominfo**	**1 Buku**	**502.403.000**

Indikator Kinerja Tahun 2024					
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan		**Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)**	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	**Pagu Indikatif**
1		**2**	**3**	**4**	**5**
a)	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Diskominfo	1 dok	502.403.000
TOTAL					**23.930.065.845**

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru.

Output Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk adalah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahunan yang sesuai dengan Tugas pokok fungsi dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Perubahan Rencana Kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

4.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Diskominfo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Diskominfo Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
   a. Melaksanakan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Plt. BUPATI NGANJUK,

SRI HANDOKO TARUNA